



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/3840>

PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* PENANGGULANGAN *STUNTING* DI DESA WINDUAJI, KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES

Chamid Sutikno¹, Alban Naufal²¹Program Studi Administrasi Publik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto²Politeknik Negeri Pontianakc.sutikno@unupurwokerto.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 19 Mei 2023

Revised date: 22 Mei 2023

Accepted date: 23 Januari 2023

ABSTRACT

This study discusses the collaborative governance process in solving community problems as an effort to accelerate the reduction of stunting in Winduaji Village, Paguyangan District, Brebes Regency. The problem of stunting on the development of children and toddlers is currently one of the special concerns in the community that is faced on an ongoing basis by the government, both at the local government level to the central government. Brebes Regency, especially Winduaji Village, Paguyangan District, is one area that has a commitment to efforts to tackle and accelerate the reduction of stunting at this time, which is still high above the national and international average standards. The purpose of this study is to see how the collaborative governance process is carried out between local governments, community groups, and the private sector in collaborating and synergizing to overcome and reduce stunting rates in the community. This research focuses on each party that plays a role and is mutually responsible for each other which is contained in a joint commitment formed based on a mutual agreement. This study uses descriptive research methods through qualitative approaches and data analysis techniques using triangulation of data and sources, while the selection of informants is selected based on ability in accordance with purposive sampling rules. The results of this study are divided into several aspects which include the initial conditions in the collaborative governance process by looking at the situation and condition of the community belonging to the stunting problem in Winduaji Village, Paguyangan District, Brebes Regency. Aspects of leadership and communication forums that are netted in the community from the village government level, to the district level and together with private parties involved in stunting prevention. The forum used for coordination is through the Posyandu group and the Team for the Acceleration of Stunting Reduction, which have been scattered in each village and sub-district. The results of this collaborative governance process are able to run with the principles and values in the collaborative process, so that the government is gradually able to reduce stunting rates and develop a network model of socialization and health education including diet and parenting patterns in an effort to prevent and accelerate stunting reduction in the village. Winduaji, Paguyangan District, Brebes Regency.

Keyword: *Collaborative Governance, Stunting*

ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas mengenai proses *collaborative governance* dalam memecahkan masalah masyarakat sebagai bentuk upaya percepatan penurunan angka *stunting* di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Permasalahan *stunting* terhadap perkembangan anak dan balita saat ini menjadi salah satu perhatian khusus dimasyarakat yang dihadapi secara berkelanjutan oleh pemerintah baik di level pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Kabupaten Brebes khususnya Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan merupakan salah satu daerah yang memiliki komitmen dalam upaya menanggulangi dan percepatan terhadap penurunan angka *stunting* saat ini yang terbilang masih tinggi diatas standart rata-rata nasional maupun internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses *collaborative governance* yang dilakukan antara pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan pihak swasta dalam bekerjasama dan bersinergi untuk menanggulangi dan menurunkan angka *stunting* di lingkungan masyarakat. Penelitian ini tertuju pada masing-masing pihak yang berperan dan saling bertanggungjawab satu sama lain yang tertuang dalam satu komitmen bersama yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif dan teknik analisis data menggunakan triangulasi data dan sumber, sedangkan pemilihan informan dipilih berdasarkan kemampuan sesuai dengan kaidah *purposive sampling*. Hasil penelitian ini terbagi atas beberapa aspek yang meliputi kondisi awal dalam proses *collaborative governance* dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat yang tergolong dalam permasalahan *stunting* di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Aspek kepemimpinan dan forum komunikasi yang terjaring dalam masyarakat mulai dari level pemerintah desa, kelurahan, sampai tingkat kabupaten dan bersama para pihak-pihak swasta yang terjalin dalam penanggulangan *stunting*. Forum yang digunakan koordinasi melalui kelompok posyandu dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selama ini tersebar di masing-masing desa dan kelurahan. Hasil dari proses *collaborative governance* ini mampu berjalan dengan prinsip dan nilai-nilai dalam proses kerjasama, sehingga secara bertahap pemerintah mampu mengurangi angka *stunting* dan mengembangkan model jaringan sosialisasi dan edukasi kesehatan meliputi pola makan dan pola asuh anak dalam upaya penanggulangan dan percepatan penurunan *stunting* di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Stunting*

PENDAHULUAN

Proses *collaborative governance* sebagai rencana strategi yang dilakukan setiap negara secara umum untuk memperbaiki tatakelola dalam pemerintah diberbagai aspek sistem kenegaraan dan menjadi upaya untuk mewujudkan sistem pemerintah yang *good government* dan demokratis dalam berbagai bidang pembangunan dilingkungan masyarakat. Pelaksanaan proses *collaborative governance* berfokus pada pembangunan pemerintah yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi dalam sistem kenegaraan secara sinergitas dengan masyarakat maupun pihak swasta. Pelaksanaan *collaborative governance* sebagai salah satu upaya untuk mencapai distribusi kewenangan, pemberdayaan dan pelayanan dalam sistem administrasi negara dengan mengedepankan prinsip dan nilai-nilai demokrasi untuk menjalin hubungan antar berbagai pihak secara integritas. Fokus dan lokus dari pelaksanaan *collaborative governance* yaitu pemerintah bukan sepenuhnya sebagai salah satu pemegang kekuasaan melainkan masyarakat ataupun rakyat juga memiliki kekuasaan dan turut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintah.

Salah satu upaya yang juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini terkait dengan penerapan *collaborative governance* dalam hal pembangunan kesehatan terutama dalam mengenai permasalahan percepatan pengurangan kasus *stunting*. Masalah gizi dan pangan yang saat dialami di negara Indonesia dengan persentase tertinggi yaitu anak yang memiliki postur tubuh pendek dimana terjadi peningkatan pada tahun 2017. Postur tubuh pendek erat kaitannya dengan *stunting*. Balita pendek (*stunting*) adalah masalah gizi secara kronis yang disebabkan oleh asupan yang kurang dalam kurun waktu yang relatif lama biasanya asupan makanan tidak memenuhi kebutuhan gizi, dan keterlambatan perkembangan dimulai di dalam rahim dan terlihat ketika anak berusia dua tahun. *Stunting* merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang menjadi program nasional dan masih terus diperbaiki hingga saat ini karena *Stunting* menjadi salah satu indikator keberhasilan kesejahteraan masyarakat meliputi pendidikan dan juga pendapatan. (Putri & Nurcahyanto, 2021).

Misi Indonesia Sehat ini bisa diwujudkan dengan berbagai upaya dan kolaborasi dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta, dalam pembangunan kesehatan melalui suatu sistem yang mengatur perilaku sosial dan individu dalam bidang

kesehatan. Proses pembangunan ini melibatkan pemerintah dan *stakeholder* yang mampu bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama yang bersifat publik, dalam mengimplementasikan kondisi kesehatan yang maksimal perlu optimalisasi pada sistem bidang kesehatan. Hal ini merupakan sinergi pendekatan vertikal dan horizontal dalam menggapai suatu tujuan secara bersama. Upaya ini secara penuh diwujudkan karena kesehatan adalah hak azasi manusia sesuai tujuan luhur negara kesatuan republik Indonesia yang tertuang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kesehatan secara komprehensif dilakukan sesuai keadaan lokal secara umum dan spesifik sesuai pendekatan sosial budaya. Tata kelolanya pun perlu melibatkan seluruh komponen atau *stakeholder* kesehatan. (Haryono & Marlina, 2021).

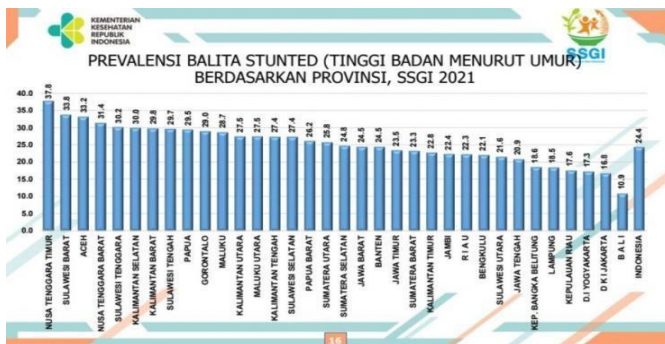
Kebijakan pencegahan *stunting* di Indonesia telah diatur dalam beberapa bentuk peraturan, yaitu seperti UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang terdapat pada pasal 141, 142, dan 143. Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa perbaikan gizi diarahkan kepada upaya untuk memperbaiki pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi standar yang seimbang, meningkatkan kesadaran prioritas gizi dan protein, melakukan aktivitas fisik dan kesehatan dengan olahraga, meningkatkan ketercapaian sarana dan mutu pelayanan gizi, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta upaya meningkatkan kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam menjamin ketersediaan bahan makanan (Febrian & Yusran, 2021).

Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) juga mengatur tentang upaya dalam pencegahan *stunting* merupakan upaya pencegahan secara bersama. Pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa upaya percepatan perbaikan gizi dilakukan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat ataupun lembaga swasta melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi. Dari undang-undang dan peraturan presiden yang telah dijelaskan diatas terlihat bahwa adanya penekanan dalam upaya pelaksanaan pencegahan *stunting* di Indonesia, namun dalam penerapannya secara umum masih belum optimal dilaksanakan. Sehingga berdampak kepada angka prevalensi *stunting* di Indonesia yang fluktuatif dari

tahun ke tahunnya (Febrian & Yusran, 2021). Untuk memperkuat pedoman pencegahan *stunting* di Indonesia, maka pemerintah menetapkan melalui dokumen Strategi Nasional Percepatan *Stunting* (Stranas *Stunting*) pada tahun 2018. Salah satu tujuan dokumen Strategi Nasional Percepatan *Stunting* ini adalah diaturnya tentang melibatkan secara multi sektoral sebagai salah satu upaya percepatan penurunan *stunting* (Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN, 2019:1). Karena selama ini salah satu penyebab terhambatnya pelaksanaan pencegahan *stunting* di Indonesia adalah belum optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintah (TNP2K, 2018:5, dalam (Febrian & Yusran, 2021)).

Berdasarkan hasil SSGI tahun 2021 angka *stunting* secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6 persen per tahun dari 27,7 persen tahun 2019 menjadi 24,4 persen tahun 2021. Hampir sebagian besar dari 34 provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019 dan hanya 5 provinsi yang menunjukkan kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan pemerintah mendorong percepatan penurunan *stunting* di Indonesia telah memberi hasil yang cukup baik. (<https://www.kemkes.go.id/>, diakses 3 Juli 2022 pukul 13.35). Berikut ini adalah grafik prevalensi balita penderita *stunting* oleh SSGI tahun 2021.

Gambar 1. 1 Prevalensi Balita Stunting



Sumber: kompasiana, 4 Juli 2022, di akses pukul 11.03 WIB

Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) dengan dukungan Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan mengumpulkan data di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan jumlah blok sensus (BS) sebanyak 14.889 Blok Sensus (BS)

dan 153.228 balita. Berdasarkan hasil SSGI tahun 2021 angka *stunting* secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6 persen per tahun dari 27,7 persen tahun 2019 menjadi 24,4 persen tahun 2021. Hampir sebagian besar dari 34 provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019 dan hanya 5 provinsi yang menunjukkan kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan pemerintah mendorong percepatan penurunan *stunting* di Indonesia telah memberi hasil yang cukup baik. (Kemenkes RI, 4 Juli 2022)

Propinsi Jawa Tengah termasuk ke dalam wilayah dengan indeks penanganan *stunting* yang baik karena tahun 2018 sudah mencapai angka 69.38 dan meningkat pada tahun 2019 mencapai 71.17. Brebes merupakan salah satu dari kabupaten/kota yang menjadi prioritas utama penurunan angka *stunting* di Jawa Tengah. Hasil Pemantauan Status Gizi di tahun 2017 menyebutkan bahwa prevalensi *stunting* di Brebes mencapai 32,7% dan masuk ke dalam 10 besar kabupaten yang menjadi prioritas penanganan *stunting* di Indonesia, Satriawan (2018) dalam (Widyaningtyas, et al., 2021). Kecamatan Paguyangan adalah salah satu dari 17 kecamatan yang merupakan wilayah administratif dari di Kabupaten Brebes. Kecamatan Paguyangan memiliki 5 kecamatan yang memiliki angka *stunting* tinggi pada tahun 2022. Berikut tabel data kejadian *stunting* di Kecamatan Paguyangan:

Tabel 1 Jumlah Anak *Stunting* di Kecamatan Paguyangan

No	Nama Desa	Tahun	Jumlah Balita <i>Stunting</i>	Presentase
1	KEDUNGOLENG	2021	17	8.02%
2	WINDUAJI	2021	81	38.21%
3	WANATIRTA	2021	35	16.51%
4	PAKUJATI	2021	21	9.91%
5	PANDANSARI	2021	58	27.36%

Sumber: Puskesmas Winduaji, 2022

Dengan besarnya jumlah penduduk di Desa Winduaji tentu memiliki masalah yang kompleks di berbagai bidang terutama di Bidang Kesehatan. Bidang kesehatan dalam hal ini fokus terhadap jumlah kejadian *stunting* dipengaruhi oleh program kebijakan penanggulangan *stunting* oleh desa tersebut. Keluarga Berikut tabel sasaran dan kasus anak berdasarkan usia kasus *stunting* di Desa Winduaji.

Tabel 2 Sasaran Dan Kasus Anak Berdasarkan Usia Kasus *Stunting* di Desa Winduaji Tahun 2022

SASARA N	USIA								JUMLA H	%
	0-5 BLN		6-11 BLN		12-24 BLN		25-59 BLN			
	SANGAT PENDEK	PENDEK	SANGAT PENDEK	PENDEK	SANGAT PENDEK	PENDEK	SANGAT PENDEK	PENDEK		
1272	3	4	5	9	1 2	3 4	20	88	175	13.7 6

Sumber: Data Pemerintah Desa Winduaji, 2022

Dari jumlah tersebut pada tabel diatas dapat kita ketahui bahwa anak di antara usia 12 sampai dengan 59 bulan pada faktanya dapat kita tarik kesimpulan bahwa masyarakat umumnya pada balita pada umur tersebut baru mengetahui bahwa anak mereka ter-*suspect stunting*, dimana masing kurangnya perhatian gizi sejak dalam kandungan maupun sejak lahir hingga usia balita. Untuk itu pemerintah menyadari betul sangat diperlukan edukasi masyarakat tentang adanya *stunting* dan pencegahannya secara masif disampaikan pada calon keluarga yang mana program tersebut merupakan salah satu fokus dari TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang mana salah satu program di bidang kesehatan pemerintah Desa Winduaji. Banyaknya angka kejadian *stunting* di Desa Winduaji dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa, dan pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mempersiapkan generasi yang emas yang sehat dan aktif. Solusi efektif yaitu dengan adanya kolaborasi dari berbagai unsur pemerintah, masyarakat dan swasta sangat perlu dalam upaya meningkatkan standar kesehatan masyarakat khususnya dalam menangani masalah *stunting* dari tingkat pemerintahan paling bawah yaitu desa. Desa Winduaji adalah desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Paguyangan. Tentunya jumlah masalah kesehatan akan lebih kompleks dibanding dengan desa lain, juga membutuhkan program yang terfokuskan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur yang ada di Desa Winduaji.

Mengingat pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai ujung tombak dalam menciptakan kesehatan anak yaitu melalui pemberian makanan bergizi dan pola asuh anak dalam pencegahan *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Peningkatan seperti pemberian makanan bergizi pada balita bersifat makanan lokal yang terjangkau oleh masyarakat dengan standart gizi yang sesuai. Dengan demikian dilakukan

collaborative governance dalam program penanggulangan *stunting* di Desa Winduaji untuk mengetahui pelaksanaan suatu masalah yang melibatkan berbagai aktor dalam mewujudkan suatu tujuan besar di masyarakat khususnya di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk melihat suatu fenomena kasus secara mendalam, dalam hal ini terkait dengan proses *collaborative governance* sebagai upaya dalam penanggulangan *stunting*. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer dan data sekunder yang memberikan informasi mengenai kondisi *stunting* di Desa Winduaji. (B.Miles et al., 2014, Creswell & Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative Governance

collaborative governance merupakan kemitraan yang bersifat publik-swasta yang didasarkan pada inisiasi kolaborasi antara negara dan non negara, aktor komersial dan nirlaba yang telah muncul untuk berpartisipasi dalam suatu paradigma (O'Brien, 2012). Kolaborasi juga dapat merujuk pada proses pengambilan keputusan secara bersama-sama (John M. Bryson, et.al. (2014), sehingga dapat diartikan bahwa kolaborasi merupakan suatu hubungan kerjasama antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama salah satunya keuntungan. Dengan hal itu, kepuasan dari didapatkan setiap pihak dalam suatu hubungan kolaborasi melalui prinsip karakteristik dari sebuah proses kolaborasi yang mengarahkan mereka pada hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat (Gray, 2004). *Governance* merupakan kerangka konsep filosofis dari sebuah teori dan analisis yang dibangun sebagai landasan paradigma manajemen pemerintahan. Konsep *governance* bukan hanya ditunjukkan pada orientasi internal melainkan pada aspek eksternal yang mewujudkan kemakmuran, keadilan bagi masyarakat (Budiaji, 2011). *Governance* dalam perspektif administrasi publik adalah proses penggunaan kekuasaan administratif, politik, dan ekonomi guna merumuskan proses kebijakan publik dan aktor - aktor yang terlibat di dalam proses pembuatan

kebijakan (Irawan, D. 2017). Sehingga saat ini *governance* menjadi salah satu strategi di berbagai negara untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek kenegaraan, yang kemudian menjadi cara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*governance*).

Pelaksanaan *governance* sangat memerlukan fokus dan lokus yang mana kekuasaan bukan hanya terletak pada pemerintah saja, akan tetapi masyarakat atau rakyat juga memiliki kekuasaan dalam ikut serta penyelenggaraan pemerintahan (Rahmatunnisa, 2011). *Governance* dalam pelaksanaannya, meliputi tiga domain utama yaitu negara atau pemerintah, masyarakat atau *civil society*, dan sektor swasta atau privat. Kemunculan *governance* merupakan paradigma yang digunakan untuk menggantikan *government* yang merujuk pada pemegang otoritas politik, sosial, ekonomi, dan administrasi kenegaraan (Plattner, 2013). Istilah *governance* secara khusus menggambarkan adanya perubahan peran pemerintah dari pemberi pelayanan kepada fasilitator dan perubahan kepemilikan dari negara kepada masyarakat. Pemerintah lebih adaptif dengan peran kekuasaan, norma, pengetahuan yang mampu membagi kewenangan secara adil dan setara (Fransen, Luc. 2015). Pusat perhatian utama dari *governance* adalah adanya memperbaiki kinerja dan perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh para aparatur. *Governance* diimplementasikan dalam beberapa tahapan, pertama sebuah proses baru dalam pemerintahan, kedua perubahan pada aturan, dan ketiga perubahan pada peran dan posisi masyarakat secara demokratis (Mardiyanta, 2011). Sektor swasta berperan dalam menciptakan lapangan kerja, dan masyarakat berperan dalam memfasilitasi interaksi secara sosial yang mampu memobilisasi individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, politik, dan administrasi pelayanan kenegaraan (Plattner, 2013). Keseimbangan komponen dalam *governance* akan membawa pengaruh besar terhadap terciptanya stabilitas politik, ekonomi, dan administrasi publik. Peningkatan hubungan yang berkaitan dengan partisipasi politik, yang mengeser pola pemerintahan lama menuju pola pemerintahan yang baru dan mampu mengubah model pemerintahan yang hirarki (Jordan et.al, 2005).

Konsep *governance* sendiri mempunyai tiga dimensi. Pertama ada dimensi kelembagaan, artinya *governance* adalah sebuah sistem administrasi yang harus melibatkan banyak pihak (multi stakeholders)

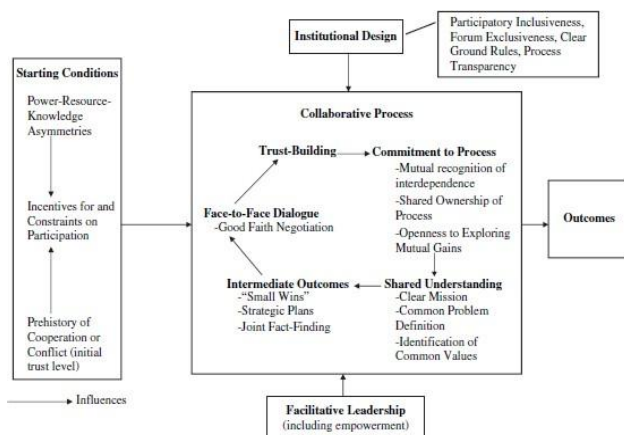
baik dari pemerintah maupun di luar pemerintah. Kedua adalah dimensi nilai-nilai yang menjadi dasar dalam penggunaan kekuasaan yang mencakup efektifitas dan efisiensi. Sedangkan, yang ketiga dimensi proses yang berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana lembaga memberi sebuah respon terhadap berbagai masalah publik (Fransen, 2015). Beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan administrasi publik terkait dengan pendekatan *governance* Menurut (Singh, 2014). ada empat poin yaitu : Adanya dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya sehingga menuntut kemampuan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Semakin banyaknya kebutuhan masyarakat yang tidak bisa diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan kemampuan masyarakat dan pasar semakin mampu mendorong kebutuhan masyarakat. Sehingga sebagian kebutuhan masyarakat banyak diselenggarakan oleh lembaga non pemerintah, globalisasi ekonomi yang semakin kuat memberikan tekanan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan dan perbaikan pelayanan publik diarahkan untuk mengurangi peran birokrasi yang selama ini dianggap inefisiensi. Dan mengurangi peran pemerintah dalam kegiatan yang sebenarnya bisa diselenggarakan oleh masyarakat, asosiasi dengan menggunakan mekanisme pasar yang bertujuan memperbaiki efisiensi nasional.

Selain itu, tata kelola kolaboratif adalah tata kelola kolaboratif yang diatur secara cermat dan terstruktur untuk menciptakan koordinasi antara publik untuk merumuskan kebijakan publik (Zeckhauser, 2011). Tata kelola kolaboratif merupakan bagian dari interaksi sistem hukum, namun di sini koordinasi juga dapat diartikan sebagai tindakan dan pedoman tindakan bagi lembaga negara dan swasta besar untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam jangka waktu tertentu. (Ansell, 2008). Menurut Ansell (2008), yang menyatakan bahwa desain institusional berpegang teguh pada protokol dasar dan aturan kolaborasi, legitimasi prosedur paling ditekankan dalam proses kolaborasi. Proses kolaboratif menggambarkan pengembangan langkah demi langkah. Proses kolaboratif adalah proses dengan diskusi yang membutuhkan partisipasi para pemangku kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada keputusan konsensus. Proses kolaboratif sebagai siklus meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, terlibat dalam

proses, berbagi pemahaman, dan hasil antara. Semua tata kelola kolaboratif didasarkan pada dialog pribadi antara para aktor yang terlibat. Sebagai proses yang bertujuan pada konsensus, ini menciptakan peluang bagi para pemilik kepentingan untuk mengidentifikasi peluang untuk saling menguntungkan. Tentu saja, ketika seseorang berbicara, ada komunikasi. *Trust-building* atau saling percaya merupakan fase yang membantu membentuk proses saling pengertian antar pemangku kepentingan dalam rangka berjanji untuk melakukan kerjasama. Memahami pemangku kepentingan tersebut merupakan bagian dari membangun kepercayaan dalam kolaborasi antar pemangku kepentingan (Ansel, 2008).

Proses *collaborative governance* merupakan pendekatan atau model yang mencoba menguraikan suatu kondisi permasalahan yang bisa diselesaikan dengan adanya upaya sinergi atau kerjasama antar pihak. Proses ini harus dilalui dalam upaya mencapai satu pemahaman yang menjadi orientasi nilai yang akan dicapai. Dalam tahapan awal proses *collaborative governance* terdapat tiga tahapan utama, yaitu kondisi awal (Starting Conditions), kepemimpinan fasilitatif (Facilitative Leadership), desain kelembagaan (Institutional Design) dan proses kolaborasi yang terdiri dari berbagai komponen seperti, komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama dan hasil sementara dalam capaian tujuan dimana masing-masing aspek berupaya memberikan gambaran dan analisis sebagai informasi awal dalam memahami permasalahan yang di hadapi terkait dengan upaya penurunan stunting di Kabupaten Brebes.

Gambar 1 Model Collaborative Governance



Sumber: Chris Ansell and Alison Gash, 2008

Proses *collaborative governance* merupakan pendekatan atau model yang mencoba menguraikan suatu kondisi permasalahan yang bisa diselesaikan dengan adanya upaya sinergi atau kerjasama antar pihak. Proses ini harus dilalui dalam upaya mencapai satu pemahaman yang menjadi orientasi nilai yang akan dicapai. Dalam tahapan awal proses *collaborative governance* terdapat tiga tahapan utama, yaitu kondisi awal (Starting Conditions), kepemimpinan fasilitatif (Facilitative Leadership), dan desain kelembagaan (Institutional Design), di mana masing-masing aspek berupaya memberikan gambaran dan analisis sebagai informasi awal dalam memahami permasalahan yang di hadapi.

1. Program Penanggulangan *Stunting*

Salah satu masalah kesehatan yang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan adalah gizi, apabila gizi tidak tercukupi akan menyebabkan gizi buruk (Shiyam, et al., 2022). Banyak faktor yang dapat menyebabkan kekurangan gizi (malnutrisi), yang sebagian besar berkaitan dengan asupan pola makan yang buruk, infeksi penyakit yang parah dan berulang, terutama pada masyarakat kurang mampu (Widyaningtyas, et al., 2021). Masalah-masalah tersebut umumnya dialami oleh masyarakat pedesaan, dimana akses informasi dan pola hidup yang masih sangat relatif sederhana, serta program pemerintah yang masih berjalan terhadap pemerataan pembangunan daerah. Awal mula kehidupan dimulai sejak kandungan ibu sampai dengan dua tahun adalah masa kritis dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Balita termasuk ke dalam *stunting* jika panjang ataupun tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U) lebih kecil dari -2 Standar Deviasi. Standar dimaksud terdapat pada Kepmenkes No 1995/Menkes/SK/XII/2010 Tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, (Sunaryo, Candradewini, & Arifianti, 2021) Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Perpres ini bertujuan untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan (Sunaryo, Candradewini, & Arifianti, 2021)

Stunting merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan gizi yang menjadi perhatian dunia. *Stunting* juga merupakan bagian dari tujuan yang ingin dicapai dalam *Sustainable Development Goal* (SDGs) sebagai wujud dari

pembangunan berkelanjutan. *Stunting* termasuk kedalam bagian pembangunan berkelanjutan yaitu untuk menghilangkan segala bentuk malnutrisi atau kelaparan salah satunya dengan meningkatkan ketahanan pangan, menurut Rini dan Jeki, 2019 dalam (Febrian & Yusran, 2021). Program Penanggulangan *stunting* yang dilaksanakan pemerintah antara lain dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK), Rumah Desa Sehat (RDS), dimana keduanya dibentuk oleh pemerintah desa dan *Community Feeding Centre* (CFC) yang dibentuk oleh puskesmas setempat. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan efektifitas pelaksanaan program dengan strategi kemitraan dimana mengikuti strategi percepatan penurunan *stunting* dalam pelaksanaan RAN-PASTI melalui pendekatan intervensi gizi terpadu, pendekatan multisektor dan multipihak, dan pendekatan keluarga beresiko *stunting*.

Program yang telah diupayakan dalam penuntasan *stunting* di Desa Winduaji antara lain Rumah Desa Sehat (RDS) yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Winduaji dan CFC oleh Puskesmas Winduaji. Rumah Desa Sehat atau RDS adalah sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan (ciptadesa.com, 2 Juli 2021, di akses pukul 10.30 WIB). RDS merupakan sebuah pusat kemasyarakatan (*community center*) yang memiliki fungsi sebagai ruang publik untuk urusan kesehatan di desa, untuk mendorong literasi kesehatan di desa, maupun mengadvokasi kebijakan pembangunan di desa (*stunting.go.id*, 2021). Sedangkan CFC atau *Community Feeding Center* yaitu suatu program berbasis masyarakat untuk memantau & mengatasi kondisi balita kurang gizi di lingkungannya dengan sasaran treatment Anak BGM (Bawah Garis Merah), Anak 2 T pada penimbangan rutin, Anak gizi buruk tanpa komplikasi, dan Anak gizi buruk pasca perawatan (<http://klayusiwalan-batangan.desa.id/>, 5 Juli 2022 Pukul 12.43 WIB). CFC di Desa Winduaji memiliki kegiatan satu bulan sekali diperuntukkan ke 10 anak prioritas dengan anak usia 2 tahun kebawah. Di setiap pertemuan, rangkaian agenda meliputi penyuluhan, pengolahan makanan tambahan (PMT), dan pemberian PMT berupa bahan pokok. Pemerintah Desa Winduaji juga membentuk TPK atau Tim Pendamping Keluarga yaitu program

baru yang bertujuan untuk penanggulangan *stunting* sejak dini berawal dari calon pengantin, ibu hamil, dan ibu pasca bersalin. Sasaran TPK juga ditunjukkan untuk meningkatkan program KB.

Dalam melaksanakan seluruh program yang ada di Desa Winduaji tentu tidak akan lepas peran dan partisipasi masyarakat. Untuk itu sangat perlu diadakan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung terlaksananya program-program penanggulangan *stunting* atau wadah yang sudah ada seperti RDS dan CFC. Dalam teori partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2000), dalam Haryono (2021), partisipasi masyarakat dalam pencegahan *stunting* sangat diperlukan, karena masyarakat akan ikut serta dalam proses pengidentifikasian masalah *stunting*, menggali potensi yang ada di masyarakat untuk membantu dalam pencegahan *stunting*, memberikan pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah *stunting*, turut serta dalam pelaksanaan upaya mengatasi masalah *stunting* dan masyarakat terlibat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi dalam pencegahan *stunting*. Partisipasi masyarakat sendiri yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Norsanti. 2021). Partisipasi masyarakat tidak terpisahkan dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pemerintahan khususnya pemerintah desa setempat berupaya memaksimalkan peran masyarakat di berbagai bidang dalam hal ini ikut serta dan menjadi subjek, bukan hanya menjadi objek adanya program pemerintah dalam bidang kesehatan khususnya dalam program penanggulangan *stunting*.

Proses Kolaborasi (*Collaboration Process*)

Menurut (Ansell dan Gash, 2008) Proses kolaboratif sebagai siklus meliputi, dialog bertatap muka (*face to face dialogue*), lalu membangun kepercayaan (*trust building*), juga komitmen terhadap proses (*commitment to process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediet outcomes*). Proses *collaborative governance* dalam penurunan *stunting* di Kabupaten Brebes dapat diketahui dari masing-masing aspek dalam proses *collaborative*. Pertama proses *face to face dialog* atau dialog tatap menjadi hal yang sangat penting, dimana pihak yang terlibat

dalam dialog tatap muka harus mampu melibatkan berbagai *stakeholder* yang memiliki kompetensi bidang dan keahlian terhadap masalah yang dihadapi. Berikut adalah penjelasan terkait dengan pihak yang terlibat dalam dialog tatap muka dan intensitas dialog antar *stakeholder* yang berlangsung selama proses *collaborative governance* dalam penurunan *stunting* di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama adanya forum diskusi lintas sektor dari pemerintah desa sampai dengan pemerintah daerah dan bersama stakeholders, dalam hal ini Dinas kesehatan, puskesmas, kelompok posyandu, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) level desa dan kelurahan, praktisi akademisi (Poltekes) dan pihak swasta (Dexa Group). Kedua, adanya kajian ilmiah dan diskusi publik untuk melakukan pemetaan wilayah pedesaan yang memiliki angka *stunting* yang tinggi kemudian melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak pemerintah desa atau kelurahan setempat untuk memperoleh informasi secara akurat. Sehingga dengan adanya dialog dan komunikasi seperti ini akan mampu memperoleh informasi dan mampu menemukan berbagai alternatif yang mampu untuk menurunkan angka *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

Kedua, proses *trust building* merupakan tahapan yang berupaya dalam membangun kesamaan visi dan orientasi yang menumbuhkan rasa saling percaya antar pihak dalam penanganan ataupun penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapinya. Upaya dalam membangun kepercayaan diantara *stakeholder* yang terlibat menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan dalam proses *collaborative governance*. Artinya, para pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta sama-sama memiliki sistem kepercayaan yang sama dalam mencapai satu tujuan. Dari proses *collaborative governance* dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes sudah terjalin sistem kepercayaan antar pihak. Hal ini dikarenakan dari awal proses upaya penanggulangan *stunting* di Kabupaten Brebes pihak pemerintah sudah melibatkan berbagai aktor baik dari pihak masyarakat dan swasta. Selain itu, adanya koordinasi yang rutin dilakukan dari level desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Proses *collaborative governance* yang dilakukan sama-

sama bertujuan untuk menciptakan masyarakat Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes yang sehat tanpa *stunting* yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, adanya sistem kepercayaan yang dibangun oleh masyarakat kepada pihak pemerintah desa sampai dengan daerah dalam penanganan permasalahan *stunting* yang berdampak pada dukungan oleh semua pihak masyarakat.

Ketiga, *commitment to process* merupakan proses yang harus dilaksanakan dalam proses *collaborative governance*. Komitmen menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan dari setiap program pemerintah untuk mendapat dukungan baik masyarakat maupun para *stakeholders*. Komitmen yang dibangun dalam proses *collaborative governance* bertujuan untuk mencapai harapan yang telah ditetapkan sebagai agenda kebijakan pemerintahlingkup nasional umumnya. Dalam upaya penanggulangan dan penurunan *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, dilakukan dari mulai awal pemerintah melibatkan masyarakat dan pihak swasta dengan adanya komitmen dalam bentuk MOU antara pemerintah desa dan Kabupaten Brebes. Sedangkan untuk kelompok masyarakat, pemerintah melalui kelompok posyandu yang ada di desa dan kelurahan memberikan surat tugas atau SK secara legal, sehingga pelaksanaan program penanggulangan dan penurunan *stunting* dilaksanakan secara sistematis dan komitmen dari masing-masing pihak. Pihak swasta dan praktisi akademik secara umum berperan sebagai edukasi dan penggerak pola makan, pola asuh serta perhatian terhadap higienis, sanitasi dan air bersih terhadap anak yang masih dibawah rata-rata usia.

Keempat, *shared understanding* merupakan upaya dalam membangun rasa saling memahami di antara aktor/pihak yang terlibat dalam proses *collaborative governance*. Sikap saling memahami ini dilakukan untuk saling memberikan keterbukaan informasi, kesamaan visi dan misi untuk mencapai alternatif dari masalah yang dihadapi. Dengan upaya penanggulangan *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, terlihat dari masing-masing pihak baik pemerintah desa maupun daerah, masyarakat dan swasta saling memahami mengenai perwujudan tujuan yang akan dicapai. Hal ini, yang menjadi daya dukung dan keterlibatan lingkungan masyarakat dan pihak swasta untuk saling membantu pemerintah desa dan daerah

dalam menangani masalah *stunting* yang dihadapi. Permasalahan *stunting* ini tidak bisa hanya diselesaikan atau ditangani oleh pemerintah saja dan memerlukan jangka waktu yang bertahap, tetapi pemerintah memerlukan dukungan dari berbagai pihak, dengan adanya kesadaran itu langsung terbangun sikap saling memahami yang selama ini sudah berjalan dalam penanggulangan masalah *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

Kelima, *intermediate outcomes* merupakan tahapan untuk mengetahui hasil sementara yang dilakukan dalam proses *collaborative governance*. Hasil sementara ini memberikan informasi terkait capaian yang sudah dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan dan penurunan *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Mengenai hasil sementara dalam penanggulangan dan penurunan *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes sudah terjalin alur komunikasi dan koordinasi yang cukup baik, antara pemerintah, masyarakat dan para pihak swasta. Adanya forum-forum yang dilakukan di semua level baik desa maupun daerah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menanggulangi *stunting*. Adanya dukung edukasi dan pengetahuan dari pihak *Dexa Group* dan Poltekes sebagai bentuk tanggung jawab sosial melalui Sosialisasi penanganan *Stunting* untuk digunakan dalam meningkatkan kesadaran pentingnya edukasi, pengetahuan dan mutu pangan maupun gizi bagi kelompok masyarakat dan anak-anak balita mengenai pola asuh, pola makan dan pengetahuan mengenai pangan yang bermutu dan bergizi yang diperuntukan oleh seluruh masyarakat secara khusus untuk meningkatkan perbaikan pada kesehatan gizi dan pangan. Masyarakat melalui program posyandu dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Brebes juga sudah membentuk gerakan sehat dan gerakan memberantas permasalahan *stunting* yang juga di dukung oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten, kelompok masyarakat, praktisi akademi dan para pihak swasta sebagai unsur *stakeholders*.

Keenam, dalam proses *collaborative governance* berupaya untuk mengukur keberhasilan atau hasil yang dikenal dengan *outcomes*. Hasil dari proses pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanggulangan dan penurunan *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten

Brebes saat ini bis dibilang cukup maksimal dan pemerintah cukup masif dalam melakukan gerakan Brebes bebas dari permasalahan *stunting*. Penanggulangan dan penurunan angka *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dilakukan cukup signifikan dengan berbagai upaya sebagai perwujudan langkah antisipasi dan penurunan angka stunting secara nyata. Kondisi awal *stunting* yang mencapai 24,4% persen, pada tahun 2021 perkembangan *stunting* di cukup signifikan mengalami penurunan cukup signifikan yaitu menurun menjadi sebesar 18,40 Pd Thun 2022. Artinya, target pemerintah menurunkan angka *stunting* 2,5 persen setiap tahun membuahkan hasil yang melebihi target yang ditetapkan. Hal ini tentunya tidak lepas dari adanya usaha dan dukungan bersama berbagai pihak yang sampai saat ini memiliki kepedulian, kesadaran dan komitmen untuk bersama-sama menanggulangi dan mengurangi permasalahan *stunting* di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

KESIMPULAN

Proses *collaborative governance* dalam upaya percepatan penurunan stunting di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes menjadi salah satu perhatian dan menjadi agenda lingkup nasional sampai desa untuk bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk bersama-sama bersinergi mengurangi angka stunting dan mencegah peningkatan stunting dari berbagai aspek. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui secara komperhensif bahwa proses kolaboratif yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, pertama pemerintah secara terbuka melibatkan unsur masyarakat dan swasta dalam awal penyusunan program kerja dalam apenanggulangan dan penurunan angka stunting di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Kedua, pemerintah selalu berupaya secara penuh untuk memberikan fasilitas dan keterbukaan akses informasi dalam upaya pemetaan dan langkah strategis dari level pemerintah desa, kelurahan, kecamatan agar terencana secara sistematis dan sinergis. Ketiga, adanya forum komunikasi dan berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai pihak dalam menggali dan menemukan solusi alternatif yang paling efektif dan efisien dalam penanggulangan dan penurunan kasus stunting di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten

Brebes. Keempat, pemerintah memiliki komitmen untuk melakukan kerjasama dalam bentuk MOU dengan pihak Deka Group dan akademisi Poltekkes serta pihak kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok posyandu dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Kelima hasil dari proses collaborative governance secara serempak mampu memberikan langkah dalam menurunkan angka stunting di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes secara signifikan dari angka 24,40 persen ke angka 18,40 persen pada tahun 2022. Artinya, dengan proses collaborative governance dengan berbagai elemen pihak yang terlibat didalamnya ini pemerintah baik desa maupun daerah mampu menurunkan angka stunting 2,5 persen setiap tahunnya.

REFERENCES

- Ansell, Chris, and Gash, Alison. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Published by Oxford University Press.
- Ashworth, R. E., McDermott, A. M., & Currie, G. (2019). Theorizing from Qualitative Research in Public Administration: Plurality through a Combination of Rigor and Richness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 29(2). <https://doi.org/10.1093/jopart/muy057>
- B.Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña - Google Books*. In Sage Publications.
- Budiaji. (2011). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. Vol. 28, No. 2. *Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung*. Hal 201.
- Creswell, & Creswell. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches - John W. Creswell, J. David Creswell - Google Books*. In SAGE Publications, Inc.
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 2.
- Fransen, Luc. (2015). The politics of meta-governance in transnational private sustainability governance. *Policy Sci* 48:293–317. Department of Political Science, University of Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam, The Netherlands.
- Haryono, D., & Marlina, L. (2021). Partisipasi Masyarakat pada Pencegahan Stunting di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. *The Indonesian Journal of Politics and Policy*.
- Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–12. <http://sits.dishub.surabaya.go.id/ver2/berita>
- Gray, Barbara. (2004). *Collaborating: Finding common ground for multi-party problems*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- John M. Bryson, et.al. (2014). Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management. *Public Administration Review*, Vol. 74, Iss. 4, pp. 445–456, The American Society for Public Administration. University of Minnesota
- Jordan, Andrew et.al. (2005). The Rise of ‘New’ Policy Instruments in Comparative Perspective: Has Governance Eclipsed Government. *POLITICAL STUDIES*: Vol 53, 477–496. Published by Blackwell Publishing Ltd, 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA.
- Mardikanto, & Soebiato. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiyanta, Antun. (2011). Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi dan Tantangan Implementasinya (Pergeseran Orientasi Ilmu Administrasi Publik dari Government ke Governance). Volume 24, Nomor 3. Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Airlangga.
- Morgan, D. L. (2017). Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach. In *Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach*.

<https://doi.org/10.4135/9781544304533>

- Nathan, A. J., & Scobell, A. (2012). Experience sampling method :Measuring the quality of everyday life. In *Foreign Affairs* (Vol. 91, Issue 5).
- Norsanti. (2021). Efektifitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Batumadi Kabupaten Balangan (Studi Kaus pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*.
- O'Brien, M. (2012). Review of Collaborative Governance: Factor Crucial to the Internal Workings of the Collaborative Process. Published by the ministry for the environment.
- Ospina, S. M., Esteve, M., & Lee, S. (2018). Assessing Qualitative Studies in Public Administration Research. *Public Administration Review*, 78(4), 593–605. <https://doi.org/10.1111/puar.12837>
- Plattner, Marc F. (2014). Reflections on “Governance”. *Journal of Democracy* Volume 24. National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.
- Putri, E. N., & Nurcahyanto, H. (2021). Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang. *Journal Of Public Policy And Management Review*. doi:10.14710/jppmr.v10i2.30594
- Rahmatunnisa. (2011). Analisis Kritis Good Governance. Program Studi Pemerintahan Dan Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran. Hal 7-8.
- Schneider, B. (2008). Review of Experience sampling method: Measuring the quality of everyday life. In *European Psychologist* (Vol. 13, Issue 2, pp. 152–153).
- Shiyam, R. L., Purnaweni, H., & Rahman, A. Z. (2022). Pencegahan Stunting Melalui Program Gemarikan oleh Posyandu di. *Journal Of Public Policy And Management Review*.
- Sunaryo, D. R., Candradewini, & Arifianti, R. (2021). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*.
- Singh, Sarinda. (2014). Religious Resurgence, Authoritarianism, and “Ritual Governance”: Baci Rituals, Village Meetings, and the Developmental State in Rural Laos. *The Journal of Asian Studies* Vol. 73, No. 4. The Association for Asian Studies, Inc., University of Queensland, Australia.
- Widyaningtyas, E., Rahmadina, S., Asrifqa, F. R., Azizah, W. N., Kirana, Z., & Muntafifah, A. (2021). Program Siaga Stunting Terintegrasi Aplikasi Pintar: Inovasi Pendidikan GizI Sebagai Upaya Penanggulangan Stunting di Desa Winduaji Kabupaten Brebes. *Dinamika Journal*.
- Zeckhauser. (2011). Managing Collaborative Performance: Changing the Boundaries of the State. *Public Performance and Management Review* Vol.29, No. 1, Pp:18-45.